

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

***Ibu-Ibu /Bapak-Bapak yang saya hormati.***

Pada kesempatan ini, panitia menugasi saya untuk mencoba mensimulasi kita semua dengan pikiran-pikiran yang baik tentang sistem pendidikan nasional dalam perspektif pembangunan karakter bangsa. Ada beberapa catatan sebelum memulai presentasi ini yang pertama saya tidak akan berbicara dalam seting atau jenjang khusus apa itu perguruan tinggi formal, non formal, informal. Yang kedua, saya akan coba berangkat dari hal-hal normatif yang ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional karena sistem pendidikan nasional telah coba dibingkai dan dilandasi oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan yang ketiga makalah ini mungkin akan menjadi kerangka pikir dan mudah-mudahan menjadi sebuah *full analysis* dan mungkin bisa menjadi suatu sistem untuk melakukan suatu diagnosis.

Kalau kita cermati pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 dengan tegas dinyatakan esensi pendidikan nasional, esensi fungsi dan esensi tujuan pendidikan nasional yang dibingkai oleh sejumlah prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan. Ada tujuh prinsip ditegaskan dalam UU dimaksud. Jika UU tersebut dipandang sebagai sistem, maka pendidikan akan menerima pengaruh dan kontribusi dari banyak faktor diluar dirinya namun pada saat bersamaan dia diharapkan memberi pengaruh dan kontribusi signifikan terhadap dunia diluar pendidikan. Dalam konteks saat ini, pendidikan diharapkan dapat membangun dan memperkuat daya saing bangsa yang cukup *sustainable* yang diharapkan bisa sejajar berkomunikasi dan bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Saya ingin mengutip pengertian pendidikan yang dituangkan dalam UU pasal 1 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003 yaitu

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Definisi di atas merupakan sebuah paradigma baru yang ditegaskan dalam UU nomor 20 tahun 2003 yang rumusannya terdapat pada UU nomor 2 tahun 1989. Pergeseran paradigma terjadi disini yaitu menekankan pada proses pembelajaran dan juga proses belajar mengajar. Paradigma tersebut dikemas dalam UU yang dimaksud dan saat ini perlu dimaknai kembali agar berimplikasi bagi kebijakan-kebijakan dan praktek pendidikan. Selanjutnya, pasal 2 UU nomor 20 tahun 2003 menekankan pada esensi pendidikan nasional:

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan jaman.

Pengertian di atas merupakan *blue print* yang mengandung landasan filosofis dan landasan-landasan *cultural* sehingga pendidikan tidak terserap dari akhlaknya. Hal tersebut perlu disiasati terkait dengan pembangunan karakter bangsa karena yang dimaksud dengan karakter perlu dirumuskan secara jelas, sistematis, dan merupakan satu bahan strategi intervensi dari upaya-upaya pendidikan.

Kita ingin melihat juga dalam konteks tadi ini adalah fungsi pendidikan menurut rumusan pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk membangun kemampuan dan membentuk khattah serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsi pendidikan tersebut ditegaskan dalam UU dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya. Inilah kaidah-kaidah normatif yang ditegaskan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, pendidikan berfungsi untuk membangun karakter, membangun watak, dan membangun kepribadian bangsa. Perlu ditegaskan, bahwa dalam hal ini, disebutkan kepribadian bangsa, tidak kepribadian orang per orang, tapi kepribadian bangsa. Kecerdasan kehidupan bangsa tidak hanya kecerdasan moral orang per orang. Saya pikir ada makna tersendiri ketika kebijakan-kebijakan praktek pendidikan itu dilaksanakan didalam berbagai jenjang dan didalam berbagai seting.



Gambar 1: Fenomena Paraktek Pendidikan

Mari kita lihat sekarang fenomena praktek pendidikan jika dilihat dari kerangka pikir seperti pada gambar 1 seperti apa praktek pendidikan itu. Apakah memang praktek pendidikan selama ini menyentuh seluruh kerangka tadi, dan apakah telah memenuhi fungsi yang sesungguhnya dan telah mewujudkan tujuan yang semestinya? Ataukah pendidikan kita saat ini bisa menghasilkan pribadi-pribadi cerdas secara individual? Proses pendidikan tentunya telah menyentuh pengembangan kecerdasan bangsa sebagai suatu yang kolektif. Pertanyaan kita adalah apakah pribadi cerdas secara individual itu akan merupakan sebuah agregat yang akan mampu mencerdaskan bangsa secara kolektif? Hal tersebut dipertanyakan. Apakah cukup kita membangun kecerdasan kehidupan bangsa dengan mencetak orang-orang pintar secara individual sehingga ini membangun sebuah agregasi? Dan apakah hal tersebut sudah tergarap secara utuh? Saya pikir ini pertanyaan yang agak filosofis yang memang akan mempengaruhi politis. UU nomor 20 tahun 2003 tadi mengamanatkan bahwa pendidikan berfungsi untuk membentuk watak, karakter, kepribadian yang beragam. Dan ketika siswa-siswa disini membentuk pribadi-pribadi yang matang, akankah kepribadian bangsa dan karakter bangsa menjadi sebuah agregat dari kepribadian-kepribadian tadi? Jika ya, pemikiran, kebijakan, landasan, dan praktek-praktek seperti apakah yang bisa menjawab pertanyaan tersebut.

***Ibu-Ibu /Bapak-Bapak yang saya hormati.***

Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat upaya-upaya pemerintah yang selama ini dilakukan dengan merumuskan berbagai standar. Ada peraturan pemerintah no 19 tentang standar nasional pendidikan. ada 8 standar yang termaktub di dalam PP tersebut dan salah satunya ada standar isi, standar kompetensi, dan standar proses. Selain itu, terdapat pula pada UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen diantaranya standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi pendidik, pula, ada standard lain seperti standard akreditasi. Semua ini adalah Patokan-patokan yang memang diujikan untuk membuat praktek dan menyelenggarakan pendidikan dengan memenuhi standar-standar minimum telah ditetapkan. Hal tersebut diharapkan akan menjadi penjamin mutu pendidikan dan nantinya akan mengangkat harkat dan martabat bangsa. Akan tetapi muncul pertanyaan apakah standar-standar tadi memang akan menjamin pengembangan potensi peserta didik untuk membangun karakter bangsa? Ini juga sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Mungkin hal ini bisa jadi sebuah hipotesis. Para dosen LPTK, misalnya, kalau kita simak standar kompetensi lulusan yang dituangkan dalam permendiknas nomor 23 tahun 2006, mengacu pada standar lulusan mungkin bidang studi mungkin pelajaran, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai pendidik ketika mengajar bidang studi tertentu secara sadar mulai melihat hubungan atau interelasi antara kompetensi pada bidang studi satu dengan kompetensi pada bidang studi lain? Padahal sesungguhnya sebuah

kompetensi kehidupan akan disumbang dan akan diberi kontribusi oleh banyak bidang studi. Akan tetapi, hal semacam itu rasanya mungkin belum terjadi dengan baik. Padahal, di dalam Permendiknas itu sendiri ada rambu-rambu yang berkaitan dengan kompetensi tersebut yang dalam prakteknya belum tersentuh.

Oleh karena itu, hipotesis saya adalah praktek pendidikan kita saat ini dengan standar yang ada, bobotnya masih berat pada tujuan-tujuan yang sifatnya individual dan mungkin belum terlalu kuat untuk menyentuh tujuan-tujuan kolektif yang mengarah pada kecerdasan kehidupan bangsa, apalagi tujuan yang sifatnya eksistensial yaitu membangun jati diri bangsa, karakter bangsa, dan kepribadian bangsa yang mantap. Selanjutnya, dimana sesungguhnya kunci agar semua standar ini bisa tersentuh dan terlayani dalam proses pendidikan. Maka kata kuncinya kembali pada proses pembelajaran dan konsisten dengan makna pendidikan yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003. Timbul pertanyaan bagaimana kita memaknai proses pembelajaran yang memang bisa menyentuh seluruh dimensi sehingga setiap upaya yang dilakukan oleh pendidik secara sadar di jalur manapun.

Kegiatan dan proses pembelajaran adalah sesuatu yang harus bermuara pada tujuan utuh pendidikan. Ini yang barangkali tidak selalu disadari di dalam praktek pendidikan dan di dalam melayani perkembangan peserta didik. Dalam hal tersebut, hal-hal yang mengembangkan aspek demokrasi harus terjadi karena sebuah proses pembelajaran adalah sebuah proses yang harus demokratis. Hal tersebut berarti seorang guru atau seorang pendidik harus berinteraksi dan memfasilitasi siswa dengan peradabannya. Tidak bisa dia menghantam anak dan peserta didik dengan cara-cara dan strategi yang sama, mesti ada peragaman dan perbedaan dan disitulah sesungguhnya visi profesi akan berlangsung dalam wahana yang amat demokratis. Sekali lagi, jadi kuncinya adalah kembali pada proses pembelajaran.

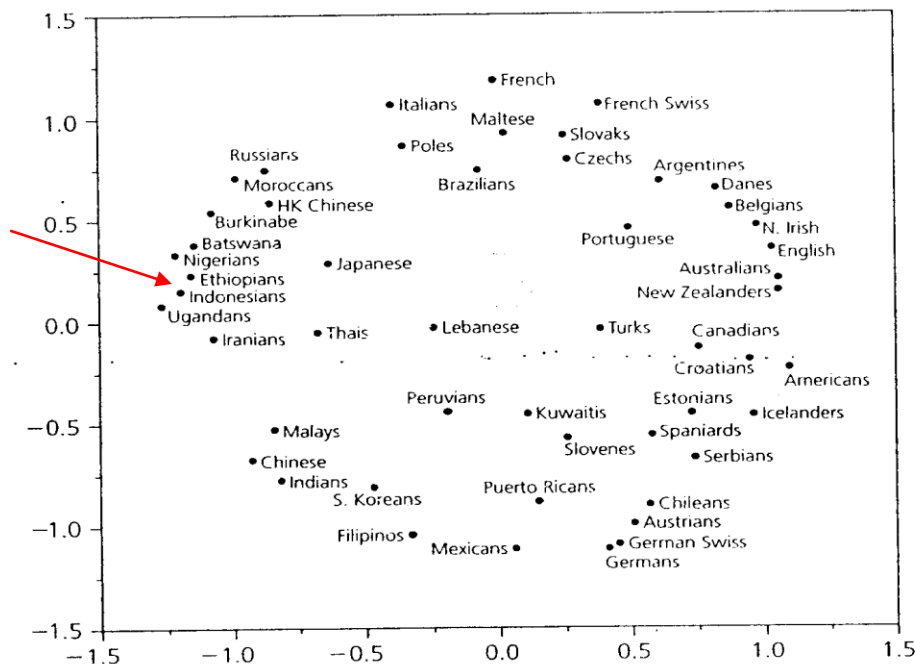
Dengan demikian, bagaimana pembangunan karakter ini bisa kita bentuk? Pertama kita perlu mendefinisikan dan merumuskan apa yang disebut dengan karakter bangsa. Idealnya, sebuah proses pendidikan tentu ingin membangun masyarakat Indonesia masa depan yang mampu mempunyai daya saing, mandiri, dan *sustainable*. Oleh karena itu pendidikan harus mempunyai dasar untuk menghantarkan masyarakat mampu menghadapi masa depan. Dalam sebuah seminar dalam rangka Hardiknas yang diselenggarakan di UPI tanggal 7 Mei 2009, Prof. Arief Rahman sudah menegaskan salah satu ciri keunggulan adalah kesadaran akan orientasi masa depan dan kita memang harus menghantarkan bangsa ini untuk menghadapi masa depan. Lalu kaitannya dengan ini bagaimana? Saya lihat disini ada sebuah karakter apa itu pribadi, individual, ataupun bangsa. Sehingga individu dan bangsa itu memiliki nilai-nilai kerja keras. Tidak mungkin sebuah bangsa dan individu akan *exist* dan *sustainable* tanpa kerja keras. Ia harus bersifat menyeluruh dan hanya pekerjaan bermutu yang akan mampu bersaing. Dia harus jujur dan bangga dengan keberhasilan atas

kejujurannya, harus efisien, dan demokratis. Jika nilai-nilai ini kita sepakati sebagai nilai-nilai karakter yang harus unggul dan bisa menjamin *sustainability* karakter bangsa manusia masa depan, maka nilai-nilai tersebut sebagai etnografi suatu bangsa yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, pendidikan memang harus berlandaskan nilai-nilai tersebut. Dalam prosesnya mungkin dengan cara mengembangkan, mungkin memperbaiki, mungkin mengubah, dan bahkan mungkin melakukan terapi *cultural*. Nilai-nilai yang kita anggap tidak baik, merugikan, dan tidak mendukung karakter ini, maka kita ubah, kita kembangkan, kita lakukan terapi, penyembuhan lewat upaya-upaya pendidikan.

Proses pembelajaran itu haruslah pembelajaran yang mendidik. Artinya pembelajaran yang mampu membangun kemampuan, *hard skill*, *soft skill*, dan karakter. Maka dari itu, kuncinya kembali terletak pada pembelajaran yang bisa menyentuh nilai-nilai tersebut.

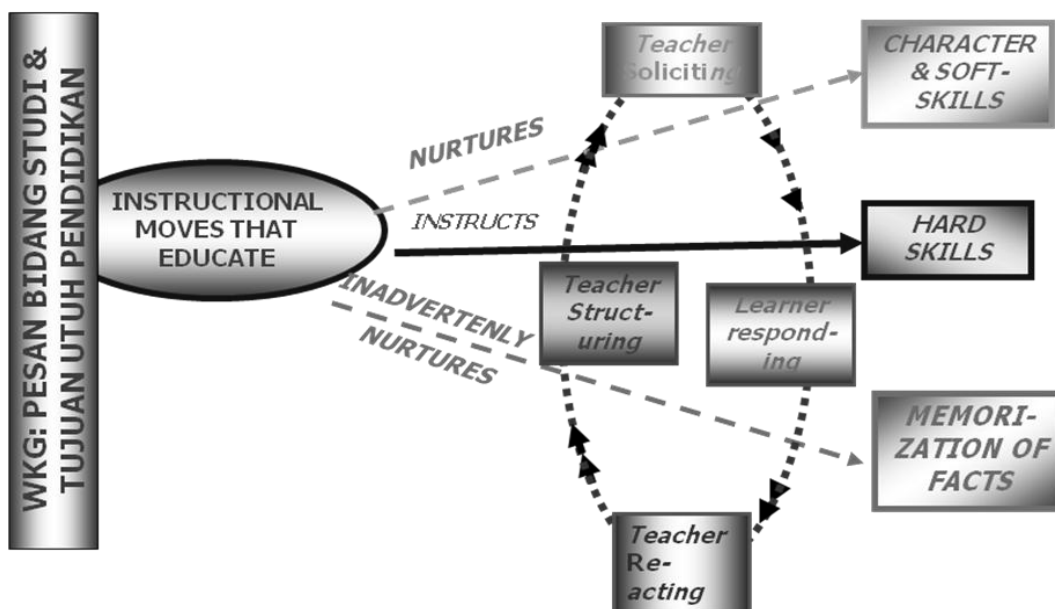
Saya ingin tunjukkan apakah terapi *cultural* itu perlu dilakukan? Pada gambar 2 di bawah ini ditunjukkan hasil penelitian, yang memperlihatkan posisi Indonesia dekat-dekat dengan Ethiopia, Nigeria, Uganda dan seterusnya. Garis horizontal menunjukkan kemampuan dari individu, kelompok, bangsa didalam berkomunikasi, apakah bersifat terbuka atau makin menarik diri, percaya diri atau tidak. Sedangkan garis vertikal menggambarkan *emotional stability*. Jika dilihat dari *emotional stability* posisi Indonesia cukup rawan, begitupun dilihat dari kemampuan berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain, pula kelihatan rawan. Jika dilihat dari keseluruhan nilai-nilai kultur yang ada pada bangsa kita, tidakkah menunjukkan perlunya sebuah terapi? Upaya pendidikan haruslah menyentuh nilai-nilai tersebut dan mengembangkannya agar posisi Indonesia tidak lagi rawan dan demi terbangunnya karakter bangsa.

Gambar 2: Graphic Display from Cultures from McCrae et al (2005)



Seorang pendidik dengan wawasan kependidikannya harus menyadari betul ketika menyampaikan pembelajaran tentang bidang studi atau sadar betul akan pencapaian utuh pendidikan, pencapaian tujuan utuh pendidikan, termasuk juga pembentukan karakter. Dengan demikian, filosofi pembelajaran yang mendidik akan membangun sebuah *trans aksi* antara peserta didik dan pendidik. Tentunya, skenario utamanya adalah seorang pendidik akan membelajarkan peserta didik untuk menguasai hasil entah itu berbentuk teori, berbentuk kecakapan, keterampilan, penguasaan pengetahuan, dan keahlian. Satu yang tidak kalah pentingnya yaitu pembentukan karakter. Sehingga di dalam pembelajaran, dibangun apa yang disebut dengan *instructional effect* yang sifatnya langsung dan ***cultural effect*** yang memang hanya terbangun dalam suasana transaksional antara pendidik dan peserta didik. Dalam prosesnya, mungkin ditemukan hal-hal yang tidak didesain akan tetapi mendukung terhadap proses pembelajaran, pencapaian, serta perubahan perilaku. Inilah sebuah proses yang dinamis sehingga sebuah proses ini akan harus selalu dimulai dengan *teacher soliciting* bahwa memang pendidik harus diingatkan.

Selanjutnya, Perencanaan sebagai skenario yaitu ia harus menciptakan iklim interaksi yang bisa mengundang peserta didik untuk memberikan respon berpikir dengan cara *recovery, inquiry*, cara apapun yang bisa membangun dinamika proses pembelajaran. Kemudian ada *learner responding*, dan kemudian ada *teacher reacting* dan ini merupakan sebuah proses transaksi dimana pendidik harus melakukan penyesuaian terhadap interaksi dan kebutuhan siswa. Kerangkanya bisa dilihat pada gambar 3.



Gambar 3: WKG: Pesan Bidang Studi dan Tujuan Utuh Pendidikan

Kesimpulannya, dengan bergesernya paradigma tadi ke arah pembelajaran maka asumsinya pembelajaran ini harus bisa mengembangkan ragam potensi peserta didik, harus menyediakan ragam layanan, dan harus mengakomodasi berbagai layanan profesional dari pendidik. Preposisi saya adalah bahwa ada layanan-layanan yang memang berfokus pada pengembangan kematangan akademik individual dan pada saat bersamaan terdapat layanan yang mengembangkan karakter. Tetapi dua hal ini bukanlah hal dikotomis namun merupakan hal yang komplementer bahkan kolaboratif. Di satu sisi, inilah harapan *nurturing effect* dan di sisi lain, pengembangan kepribadian dan kemandirian yang akan membntuk perkembangan optimum peserta didik yang terarah pada tujuan utuh pendidikan dengan didukung oleh manajemen dan *leadership* yang profesional. Maka disini diharapkan dapat terbentuknya proses dan layanan utuh pendidikan.

Dari kesimpulan di atas, sampailah kita pada sebuah otokritik yang terangkum pada tiga poin yaitu 1) Reviu menyeluruh prinsip, kerangka kerja, dan praktek pendidikan dlm konteks pembangunan karakter bangsa; 2) Penerapan kaidah pendidikan dalam praktek secara konsisten dan benar; dan 3) Pengendalian mutu proses, kinerja pendidik di lapangan, dan *leadership* pendidikan nasional.

Terakhir, saya ingin memberi komentar terhadap kinerja pendidik terutama yang berkaitan dengan sertifikasi. Hal yang harus dilakukan adalah meyakinkan masyarakat bahwa pendidik ingin bekerja secara bermutu dan tentu saja hal tersebut memerlukan dukungan manajemen ketenagaan yang lain dari sebelumnya. Saat ini pemerintah secara otonomi ada pada pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, maka sesungguhnya di dalam otonomisasi tersebut telah terjadi proses pembentukan manajemen, *leadership*, dan penataan ketenagaan dengan baik. Sehingga para pengawas di lapangan, misalnya, telah melakukan pembinaan kepada guru untuk membangun proses pembelajaran seperti tadi.

Sekian dan terima kasih

**Rektor,**

**Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M. Pd.**